

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia, pernah dilakukan sebelumnya oleh :

Irwanti (2014) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Periode 2008-2012. Dana perimbangan terdiri dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana otonomi khusus (DOK). Hasil penelitian yang menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM) menunjukkan bahwa selama periode penelitian variabel dana bagi hasil (DBH) tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, variabel dana alokasi umum (DAU) signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel dana alokasi khusus (DAK) tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan dana otonomi khusus (DOK) signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Novitasari (2015) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia seperti belanja pendidikan, belanja kesehatan, kemiskinan, dan PDRB. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena mengambil dari keseluruhan populasi yang ada yaitu 38 kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2009-2013. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) yang menunjukkan bahwa secara simultan belanja pendidikan, belanja kesehatan,

kemiskinan dan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Dan secara parsial dengan tingkat kepercayaan 5% terdapat tiga variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM yakni belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan PDRB, sedangkan variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Secara keseluruhan permodelan dengan FEM menghasilkan nilai  $R^2$  sebesar 97,56 persen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan IPM dapat dilakukan dengan cara meningkatkan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan PDRB perkapita serta menurunkan kemiskinan.

Orinbao (2013) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan seberapa besar pengaruh angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (MYS), angka harapan hidup (L), pengeluaran riil per kapita (PPP), dan kemiskinan (K) tingkat kabupaten dan kota terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat tahun 2006-2009. Metode analisis yang digunakan adalah data panel dengan pendekatan *Random Effect*. Untuk mengolah data data menggunakan program E-views 5.1. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh bahwa F-statistik (384,387) > F-tabel (2,53) artinya, secara keseluruhan variabel secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua Barat. Sedangkan secara individual (uji t) variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah angka melek huruf, rata-rata lama sekolah (MYS), dan pengeluaran per kapita (PPP) sedangkan variabel angka harapan hidup (L) dan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

Usmaliadanti (2011) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan serta jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*). Sedangkan hasil penelitian ini adalah bahwa variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel pembangunan manusia sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan Manusia.

## **2.2. Landasan Teori**

Pada tinjauan pustaka ini akan di bahas mengenai teori yang menjadi landasan pada penelitian ini.

### **2.2.1. Konsep Pembangunan**

Menurut Streeten, Direktur *World Development Institute* konsep pembangunan didefinisikan sebagai upaya menghapuskan berbagai bentuk penyakit umat manusia: malnutrisi (kekurangan gizi), penyakit buta huruf (pendidikan), daerah pemukiman kumuh, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Jika hanya dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan agregat, maka mungkin pembangunan yang sudah dijalankan selama ini telah membawa keberhasilan besar. Tetapi apabila di ukur atas dasar jumlah kesempatan kerja baru, peningkatan keadilan sosial dan pemberantasan kemiskinan, pembangunan selama ini tidak membuahkan hasil (Todaro, 2000:92).

Pembangunan pada awalnya hanya diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi sebagai wujud tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi pada suatu negara, namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi, seperti yang telah di jelaskan pada latar belakang diatas khususnya pada negara atau daerah yang sedang berkembang. Negara berkembang pada dekade 1950-1960 mengutamakan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dari pembangunan, namun hal ini justru menimbulkan permasalahan yang baru yaitu disparitas.

Pada dekade berikutnya arah dan konsep pembangunan diarahkan pada tujuan pemerataan sebagai makna konsep redistribusi pertumbuhan yang menitikberatkan pada mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional demi meningkatkan standar hidup masyarakat (Todaro, 2006:22). Dalam salah satu publikasi resminya yaitu *World Development Report* pada tahun 1991 Bank Dunia melontarkan pernyataan tegas bahwasanya Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas hidup terutama di negara-negara yang paling miskin. Pembangunan merupakan proses multidimensional yang memiliki cakupan luas bukan hanya semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun mencakup juga struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional dengan tetap memacu pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Smith, 2006:28). Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan terdapat tiga tujuan dari pembangunan menurut Usaliadanti (2011) yaitu :

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghambat dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau bangsa negara lain, namun juga pada setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

#### **2.2.1.1. Pengertian Pembangunan Manusia**

Definisi Indeks Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nations Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut maka penduduk merupakan tujuan akhir dari pembangunan hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Todaro (2006). Sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi (BPS, 2014:2). Dalam konsep

pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama (IPM Papua Barat, 2013:5) yaitu :

- a. Produktivitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.
- b. Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.
- c. Kesenambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hiup harus dilengkapi.
- d. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan tanpa mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan manusia (UNDP, 1995:118) yaitu :

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
- b. Pembangunan dimaksud kan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena

itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu : produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

#### **2.2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu : Lama hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir, Pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan Standar hidup yang diukur dengan konsumsi perkapita (BPS:BAPENAS:UNDP, 2004). *Human Development Index* (HDI) pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 . Rancangan pembangunan manusia yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. IPM menggunakan ukuran sosial ekonomi yang lebih komperhensif

dari pada GNP dan memungkinkan untuk membandingkan negara dengan cara yang berbeda. Perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya :

- a. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah ideks dasar.
- d. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya indeks pembangunan manusia di suatu negara, yaitu :

- a. Tingkat kesehatan yang di ukur harapan hidup saat lahir , Angka Harapan Hidup ketika lahir merupakan suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk yang dilahirkan pada tahun tersebut (BPS, 2001).
- b. Tingkat pendidikan yang di ukur dengan jumlah penduduk yang melek huruf. Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari (BPS, 2001) dan Rata-rata Lama Sekolah adalah lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun keatas.
- c. Standar kehidupan di ukur dengan tingkat pengeluaran per kapita. Kemampuan Daya Beli Penduduk atau Purchasing Power Parity (PPP) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam

menghitung IPM. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB per kapita atau yang dikenal dengan *income* per kapita.

Besaran skala IPM menurut BPS, suatu wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, ke empat ketogi itu ialah (UNDP, 2010) :

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Capaian IPM**

No	Klasifikasi	Capaian IPM
1	Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
2	Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
3	Sedang	$60 \leq IPM < 70$
4	Rendah	$IPM < 60$

(Sumber : BPS Provinsi Papua Barat 2013)

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia yaitu :

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana :

$X_1$  = Indeks Harapan Hidup

$X_2$  = Indeks Pendidikan

$X_3$  = Indkes Standar Hidup Layak

### 2.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pada pertengahan tahun 1950-an berkembang teori pertumbuhan neo-klasik yang merupakan suatu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Robert Solow dan Trevor Swan

merupakan pemenang hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1987 yang sekaligus sebagai perintis teori Neo-Klasik yang berkembang pada tahun 1950-an, kemudian diikuti dan dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry Johson, dan J.E Meade. Pendapat-pendapat para ahli tersebut, yaitu (Suryana, 2000:58).

- a. Adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi.
- b. Perkembangan merupakan proses yang gradual.
- c. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
- d. Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan.
- e. Aspek internasioanl yang merupakan faktor bagi perkembangan.

Menurut Solow (dalam Sukirno 2004:437) yang menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya penambahan modal dan tenaga kerja. Namun faktor yang terpenting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi banyak terbantu oleh pembangunan manusia dan tidak mungkin pertumbuhan tersebut akan berjalan lama tanpa adanya pembangunan manusia (Todaro, 2006:55).

Solow-Swan menganggap perekonomian akan tetap dalam keadaan *full employment* dan kapasitas peralatan modal akan tetap digunakan sepanjang waktu, sehingga perkembangan ekonomi tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan tekhnologi. Model Solow menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan populasi dalam perekonomian adalah determinan jangka panjang dari standar kehidupan. Berdasarkan model Solow, semakin tinggi tingkat pertumbuhan populasi, semakin rendah tingkat output dan tingkat modal per

pekerja (Mankiw, 2006:208) sehingga harus di ikuti oleh pembangunan manusia agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

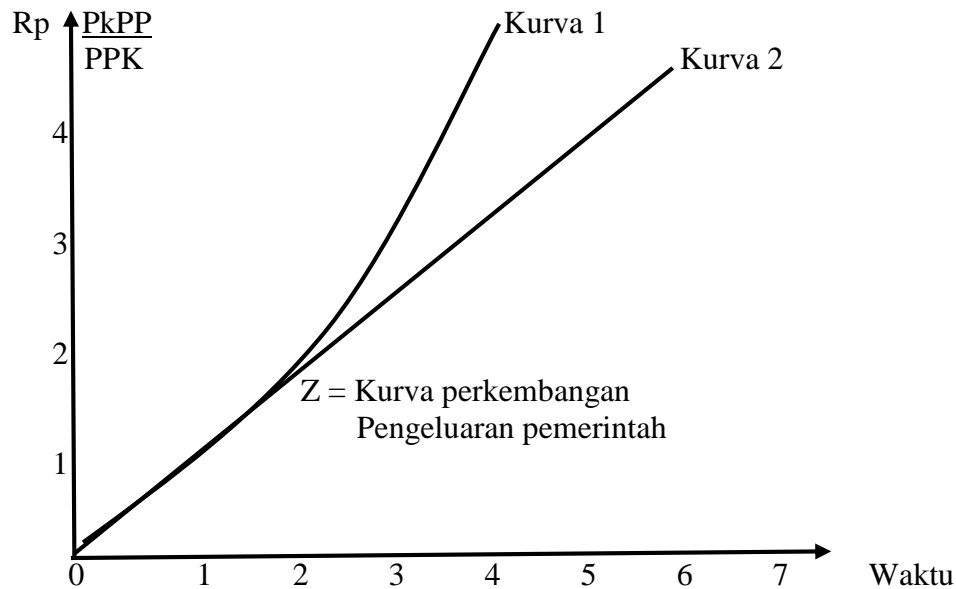
### **2.2.3. Teori Pengeluaran Pemerintah**

Pengamat empiris Adolf Wagner melakukan penelitian di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Selanjutnya Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul di masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kesehatan, kebudayaan, dan lain-lain (dalam Prasetya, 2012).

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relative peran pemerintah yang semakin meningkat.

Beberapa penyebab semakin tingginya pengeluaran pemerintah menurut hukum Wagner, yakni meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan, dan

meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :



(Sumber : Modul Ekonomi Publik Universitas Brawijaya 2012)

**Gambar 2.1**  
**Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Wagner**

$$\frac{PP_kP}{PPK_1} < \frac{P_kPP_n}{PPK_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n}$$

Dimana :

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/ Jumlah penduduk

1,2,.... n : Jangka waktu (tahun)

Menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5 (dalam Prasetya, 2012), antara lain:

a. Pengeluaran Investasi

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dan lain-lain.

b. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

c. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

Pengeluaran kesejahteraan rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi gembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan lain-lain.

d. Pengeluaran Penghematan Masa Depan

Adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar dimasa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak yatim, dan lain-lain.

e. Pengeluaran Yang Tidak Produktif

Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Namun, diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang.

Dasar pengeluaran pemerintah Indonesia untuk sektor pendidikan sudah di atur dalam undang-undang yaitu pada UU No.20 tahun 2005 dimana menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan di alokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.

#### **2.2.4. Teori Pendidikan**

Pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin perkembangan sosial maupun ekonomi (PBB dalam Todaro, 2000:384).

Sistem pendidikan seringkali menggambarkan berbagai hal yang paling esensial dari suatu masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat negara-negara Dunia Ketiga. Misalnya bila struktur sosial dan ekonomi suatu masyarakat ternyata sangat tidak merata, maka sistem pendidikan akan dapat mencerminkan keadaan tersebut dalam bentuk terbatasnya jumlah orang yang bisa menikmati jenjang pendidikan yang tinggi. Dalam waktu yang bersamaan, bidang pendidikan dapat pula mempengaruhi bentuk dan arah perkembangan suatu masyarakat di masa mendatang lewat berbagai jalan. Dengan mengungkapkan struktur sosioekonomi masyarakat dimana sistem pendidikan itu berada (terlepas dari merata atau tidaknya struktur tersebut), sistem pendidikan akan cenderung meneruskan, memperkuat, dan menghasilkan kembali struktur sosial ekonomi yang sama. Sebaliknya, penataan kembali sistem pendidikan secara cermat, baik itu dilakukan dari dalam ataupun diluar sistemnya sendiri, mempunyai potensi yang besar bagi terciptanya

perbaikan-perbaikan pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Todaro, 2000:404).

Perluasan kesempatan bersekolah dalam segala tingkat mendorong pertumbuhan ekonomi secara agresif melalui (1) terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena bekal pengetahuan dan keterampilan mereka lebih baik; (2) tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas (yang berarti kesempatan untuk memperoleh pendapatan) bagi para guru, buruh bangunan, percetakan buku-buku sekolah, pabrik tekstil untuk seragam sekolah, dan sebagainya; (3) terciptanya suatu kelompok pimpinan yang terdidik untuk mengisi lowongan jabatan di unit usaha, lembaga, perusahaan, dan organisasi milik pemerintah, dan lain-lain; (4) tersedianya berbagai program pendidikan dan pelatihan, mulai dari yang ditunjukkan untuk memberantas buta huruf dan memberikan keterampilan dasar sampai dengan yang dimaksudkan untuk membina sikap-sikap modern (Todaro, 2000:405-406).

#### **2.2.5. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan, Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berikut peneliti akan sajikan hubungan antar variabel dalam penelitian ini, yaitu :

##### **2.2.5.1 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia**

Belanja pendidikan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan (Novitasari, 2015). Di

banyak negara berkembang, pendidikan formal adalah “industri” dan konsumen terbesar anggaran pemerintah. Bangsa-bangsa yang miskin telah menginvestasikan sejumlah uang yang sangat besar untuk bidang pendidikan. Alasannya sendiri bermacam-macam salah satunya ialah para petani yang “melek huruf”, sekurang-kurangnya pernah mengenyam pendidikan dasar sehingga bisa baca tulis, dianggap akan lebih serta lebih tanggap dalam menerima inovasi dan teknologi pertanian yang lebih produktif dibandingkan dengan petani-petani yang masih buta huruf. Para orang tua semakin menyadari bahwa pada masa yang akan datang berbagai tempat kerja hanya mau menerima tenaga-tenaga yang terampil dan berpendidikan. Bagi golongan miskin, pendidikan dianggap sebagai jalan satu-satunya mengangkat anak-anak mereka dari lembah kemiskinan (Todaro, 2000:387-388).

Salah satu faktor penting yang dinilai efektif dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Faktor ini merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Untuk mencapai pembangunan manusia yang tinggi diperlukan sebuah percepatan agar mendapatkan hasil yang optimal bagi tiap daerah. Berdasarkan pengalaman pembangunan manusia di beberapa negara, untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan dengan alokasi belanja publik yang memadai untuk bidang pendidikan (IPM Papua Barat, 2014:5).

#### **2.2.5.2 Hubungan antara Persentase Penduduk Miskin dan Indeks**

##### **Pembangunan Manusia**

Ravi Kanbur dan Lyn Squire (dalam Franciari, 2012) menjelaskan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan

dibidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang. Terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif.

Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan-akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk - mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM adalah orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Todaro sebelumnya yaitu rendahnya produktivitas di kebanyakan negara-negara berkembang juga bersumber dari lemahnya kekuatan dan kesehatan fisik para pekerjanya yang merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendapatan. Tingkat produktivitas yang rendah lebih lanjut menyebabkan pendapatan rendah, dan pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan itu selanjutnya menyebabkan seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu hal yang bisa

dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pembangunan manusia (dalam Widodo, 2011).

Definisi kemiskinan yang digunakan diberbagai negara bermacam-macam. Kemiskinan sering di pandang sebagai ketidakmampuan untuk membayar biaya hidup minimal menurut Bank Dunia (1990). Walaupun beberapa ahli berpendapat bahwa kemiskinan juga merupakan kurangnya akses terhadap jasa-jasa seperti pendidikan, kesehatan, informasi, serta kurangnya akses measyarakat terhadap partisipasi pembangunan dan politik. Definisi kemiskinan dapat juga dipandang dari sisi relatif dan sisi absolut.

a. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu Negara pada waktu tertentu.

b. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Indonesia menggunakan definisi kemiskinan secara absolut yang mampu untuk membandingkan kemiskinan secara umum dan menilai efek dari kebijakan program-program penanggulangan kemiskinan antar waktu (Analisis Kemiskinan Nasional, 2013:4).

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Persentase Penduduk Miskin menurut BPS adalah Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]$$

Dimana :

$P_0$  = Persentase Penduduk Miskin

$z$  = Garis Kemiskinan

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

$n$  = Jumlah Penduduk

Kegunaan Persentase Penduduk Miskin untuk mengetahui besarnya persentase penduduk yang dikategorikan miskin disuatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan disuatu wilayah juga tinggi.

### **2.2.5.3 Hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks**

#### **Pembangunan Manusia**

Negara maju maupun negara berkembang sama-sama pernah atau sedang mengalami masalah pengangguran. Tetapi masalah tersebut berbeda tingkat keparahan dan waktu penyelesaiannya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sumber daya alam, teknologi, luas wilayah, sumber daya manusia, dan lain-lain. Sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga mempunyai tujuan-tujuan utama yang sama antara lain memerangi kemiskinan, mengatasi ketidakmerataan distribusi pendapatan, mengurangi tingkat pengangguran, memenuhi standar-standar yang minimum dibidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kecukupan pangan bagi seluruh penduduk (Todaro, 2000:37).

Todaro juga mengatakan bahwa manusia merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran, dan untuk melakukan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan teratasinya jumlah pengangguran dan mendapatkan pendapatan yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia.

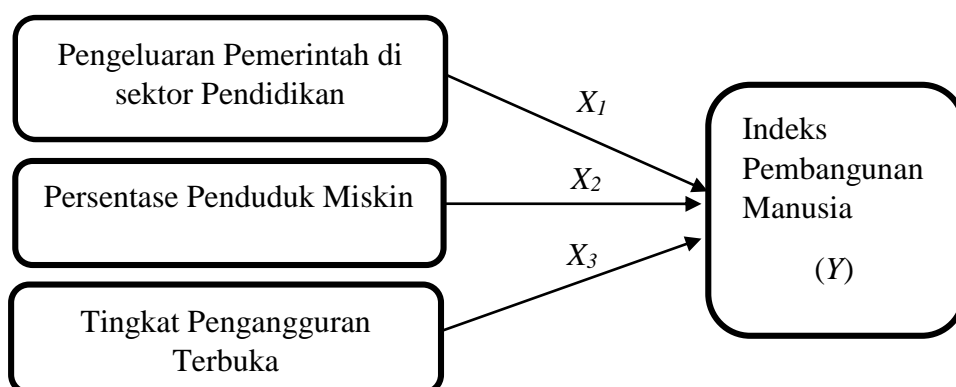
Menurut Sukirno (2011:330) pengangguran terbuka merupakan salah satu jenis pengangguran yang diklasifikasikan berdasarkan cirinya. Pengangguran Terbuka tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian

semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini didalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran yang akan dilakukan mengenai Analisis Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2013. Berdasarkan teori yang telah dijabarkan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui gambar berikut ini :



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

Perubahan nilai variabel Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan ( $X_1$ ), Persentase Penduduk Miskin ( $X_2$ ), dan Tingkat Pengangguran Terbuka ( $X_3$ ), dimaksudkan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( $Y$ ) dengan menggunakan hipotesis uji F dan uji t.

#### **2.4. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang ada yang diajukan oleh peneliti yang kebenarannya masih harus di uji secara empiris. Berdasarkan hal itu hipotesis yang diajukan yaitu :

1. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua Barat.
2. Persentase Penduduk Miskin berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua Barat.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua Barat.